JUIMA : Jurnal Ilmu Manajemen
p-ISSN 2337-9804
e-ISSN 2549-8843

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENERIMAAN RETRIBUSI TERMINAL SERTA PROSPEKNYA DI KOTA DENPASAR

Ni Made Yusmini, Kadek Dwi Indriani Utami
Fakultas Ekonomi Universitas Mahendradatta
Email: yuzi_san@ymail.com

Abstract

Denpasar City as the Capital of the Province of Bali is a center of social, economic activity and tourism destinations. Terminal levies as a source of regional revenue need to be developed and assessed for effectiveness, efficiency and prospects as a basis for making optimal terminal service management policies. The purpose of this study was to determine the level of effectiveness of terminal retribution receipts in Denpasar City, to determine the level of efficiency of terminal retribution receipts in Denpasar City and to determine the prospects of terminal retribution receipts in Denpasar in 2009-2014. The data used in this study are secondary data collected from related agencies within 5 (five) years from 2004-2008. The analysis used in this study is the analysis of effectiveness, efficiency, and prospects. The analysis shows that the level of effectiveness of terminal retribution receipts based on targets set from 2004-2008 averaged 101.04 percent which is in the very effective category, The average level of efficiency in managing terminal fees in Denpasar from 2004-2008 is classified as inefficient, because it is above 100 percent, even reaching an average of 110.48 percent, and prospects / estimates of terminal retribution receipts in Denpasar City in 2009-2014 amounting to Rp 1,376,903,828, Rp 1,632,462,579, Rp1,888,021,330, Rp 2,143,580,081, Rp 2,399,138,832, Rp 2,654,697,583.

***Keywords**: Effectiveness, Efficiency and Prospect.*

I. PENDAHULUAN

Diberlakukannya Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menyebabkan terjadinya perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dengan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintah maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan berlakunya undang–undang tersebut, maka ada semacam keharusan atau kewajiban bagi daerah-daerah, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan potensi, efektivitas dan efisiensi pendapatan daerahnya masing-masing. Dalam hal keuangan daerah, masing-masing daerah diharapkan semakin mandiri, artinya sebisa mungkin daerah itu mengurangi ketergantungannya kepada pemerintah pusat.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber-sumber penerimaan daerah adalah Pendapatan Asli

Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah ini, kebanyakan daerah dalam hal pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat mengandalkan pembiayaan dari pemerintah pusat. Ini menunjukan, bahwa peranan pemerintah pusat dalam alokasi anggaran hasil sangat kuat, untuk meningkatkan kemampuan keuangan pendapatan asli daerah sebagai sumber pembiayaan yang berasal dari daerah sendiri yang terdiri dari: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sumber–sumber tersebut diharapkan dapat menjadi penyanggah utama pembiayaan. Semakin banyak kontribusi sumber-sumber tersebut, maka semakin banyak kegiatan daerah yang dapat dibiayai dan ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat akan berkurang, sehingga pemerintah daerah bisa semakin mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya (Syamsi, 1987 : 213).

Kemandirian keuangan daerah ditujukan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, seperti bantuan pemerintah pusat atau pinjaman. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi ke daerah dalam jumlah besar.

Kota Denpasar sebagai Ibu Kota Propinsi Bali merupakan pusat kegiatan sosial, ekonomi serta tempat tujuan pariwisata. Untuk menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan daerah tersebut, maka pemerintah perlu menggali sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat berpotensi membiayai pembangunan. Pajak dan Retribusi Daerah selama ini merupakan sumber pendapatan daerah dominan di Kota Denpasar, oleh karena itu perlu di tingkatkan penerimaannya. Penerimaan komponen PAD dapat lebih jelas dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Komponen PAD Kota Denpasar Tahun 2004-2008 (dalam Rupiah)

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil BUMD dan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah.	Total PAD
2004	56.270.379.492,59	27.308.335.215,99	3.247.821.914,57	4.120.414.246,47	90.946.950.869,62
2005	75.653.250.195,00	29.059.077.595,00	4.081.187.633,60	7.507.816.643,00	116.301.332.066,60
2006	68.621.926.068,50	40.103.248.792,00	5.108.079.004,39	11.925.163.469,20	125.758.417.334,09

2007	85.524.066.401,52	38.233.722.804,00	4.819.362.199,57	9.904.239.777,35	138.481.391.182,44
2008	144.368.677.932,40	47.126.422.649,17	5.049.091.892,54	10.227.791.210,74	176.072.307.983,85

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Denpasar, 2009

Pada tabel diatas, menunjukkan pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai komponen pendapatan asli daerah. Dimana diketahui, bahwa dari tahun ke tahun penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar selama periode waktu 2004 sampai dengan 2008 terus mengalami peningkatan. Retribusi Daerah di Kota Denpasar memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD selain penerimaan dari pajak, Hal ini disebabkan komponen retribusi di Kota Denpasar sangat banyak. Kemudian untuk mengetahui penerimaan komponen retribusi daerah di Kota Denpasar tahun 2004-2008 dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Pada Tabel 1.2 menunjukkan, bahwa komponen retribusi di Kota Denpasar sangat banyak. Salah satu retribusi Kota Denpasar yang penerimaannya masih kecil dan perlu dikembangkan adalah retribusi terminal. Penerimaan retribusi terminal dari tahun ke tahun mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2004, penerimaan retribusi terminal sebesar Rp 379.157.000,00 kemudian penerimaannya menurun menjadi Rp 347.294.800,00 pada tahun 2005, Rp 334.126.096,00 pada tahun 2006 dan Rp 319.923.650,00 pada tahun 2007. Padahal terminal merupakan prasarana transportasi jalan yang mempunyai posisi penting dan strategis dalam memperlancar perekonomian, sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dari/dan/ke Kota Denpasar. Pada tahun 2008, penerimaan terminal meningkat menjadi Rp 1.670.636.330,00, dimana sumbangan terbesarnya berasal dari penerimaan terminal barang yang baru beroperasi pada awal tahun, namun peningkatannya tidak terlalu besar. Diperkirakan terjadi kebocoran dalam menghitung penerimaan retribusi terminal dari tahun 2004-2008, dimana terdapat beberapa penerimaan yang tidak tercatat sebagai penerimaan terminal, dan penetapan target tidak disertai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

Tabel 1.2 Komponen Penerimaan Retribusi Daerah di Kota Denpasar Tahun 2004-2008

No.	Tahun / Jenis Retribusi	2004	2005	2006	2007	2008
1	R.Pelayanan Kesehatan	15.404.692.086,99	17.562.855.317,00	22.518.211.914,00	21.296.670.663,00	26.630.305.659,17
2	R.Pelayanan persampahan	2.426.616.500,00	2.274.829.000,00	2.327.203.500,00	2.572.472.000,00	2.558.234.000,00
3	R.Penggantian Biaya KTP dan Akte Capil	1.020.904.000,00	1.072.526.000,00	1.179.228.000,00	1.341.909.000,00	1.658.195.000,00
4	R.Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.181.525.900,00	-	6.300.000.000,00	6.279.035.000,00	6.315.829.000,00
5	R.Pengujian Kendaraan Bermotor	1.940.186.400,00	2.190.848.250,00	2.175.830.550,00	2.266.686.200,00	2.276.601.950,00
6	**R.Terminal**	**379.157.000,00**	**347.294.800,00**	**334.126.096,00**	**319.923.650,00**	**1.670.636.330,00**
7	R.Rumah Potong Hewan	556.595.925,00	517.134.350,00	527.879.475,00	537.603.550,00	549.727.700,00
8	R.IMB	2.552.994.875,00	4.024.164.644,00	3.757.399.599,00	2.263.276.149,00	3.956.776.262,00
9	R.Ijin Trayek	-	-	-	-	3.383.000,00
10	R.Pemindahan Kendaraan Bermtr	-	-	-	-	1.000.000,00
11	R.Ijin Gangguan	519.949.719,00	699.394.000,00	948.782.758,00	853.160.962,00	968.151.308,00
12	R.Perikanan	98.712.810	80.066.180,00	34.586.900,00	32.931.330,00	44.299.440,00
13	Setoran Lahan BPP	-	-	-	1.014.300,00	1.023.000,00
14	R.SIUP,SIUP MB, IUI, TDP	227.000.000,00	289.965.000,00	389.845.000,00	169.040.000,00	350.665.000,00
15	R.Ijin Prinsip dan Usaha	-	-	-	-	141.695.000,00
Total Penerimaan Retribusi		27.308.335.215,99	29.059.077.595,00	40.103.248.792,00	38.233.722.804,00	47.126.422.649,17

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Denpasar,2009

Sehubungan dengan penelitian ini, yang menitik-beratkan pada penerimaan retribusi terminal, Maka perlu dijabarkan lebih lanjut Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal di Kota Denpasar pada tahun 2004-2008 dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Berdasarkan Tabel 1.3 , dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan retribusi terminal di Kota Denpasar mengalami fluktuasi yaitu Pada tahun 2004 penerimaannya sebesar 103,59 persen ,dimana realisasinya lebih besar dari target yang ditetapkan. Kemudian pada tahun 2005 terjadi penurunan penerimaan realisasi yaitu hanya sebesar 91,15 persen, Hal ini disebabkan kenaikan target yang ditetapkan tidak berdasarkan kondisi yang ada di lapangan. Pada tahun 2006, penerimaan retribusi terminal mengalami peningkatan, sehingga realisasinya terhadap target sebesar 114,04 persen, Hal ini dikarenakan pemerintah merasa pesimis dengan adanya perubahan ekonomi, sehingga target penerimaan di turunkan . Tetapi pada tahun 2007 dan 2008 realisasinya kembali mengalami penurunan terhadap pencapaian target. Bisa dilihat bahwa target yang ditetapkan hanya berdasarkan penerimaan tahun sebelumnya tanpa memperhitungkan kondisi di lingkungan terminalnya.

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal di Kota Denpasar Tahun 2004-2008

Tahun	Target (Rp)	Realisasi	
		(Rp)	(%)
2004	366.000.000,00	379.157.000,00	103,59
2005	381.000.000,00	347.294.800,00	91,15
2006	293.000.000,00	334.126.096,00	114,04
2007	284.000.000,00	319.923.650,00	112,65
2008	1.994.000.000,00	1.670.636.330,00	83,78

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Denpasar, 2009

Pemerintah Daerah Kota Denpasar selama lima tahun terakhir telah menerapkan dua peraturan daerah mengenai tarif dan struktur terminal, yang pertama adalah Perda Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2001 mengenai tarif retribusi terminal. Dimana indikasi penetapan tarif retribusi fasilitas terminal masih sangat rendah, sehingga belum dapat dioptimalkan penerimaannya. Struktur dan besarnya tarif retribusi Tahun 2004 dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Terminal di Kota Denpasar Tahun 2001

No	Jenis Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Pelayanan terminal untuk kendaraan penumpang umum dan bus umum		
	a. Mobil Bus antar kota antar propinsi	1.500,00	Sekali masuk
	b. Mobil bus antar kota dalam propinsi	500,00	Sekali masuk
	c. Mobil mikro bus AKDP	300,00	Sekali masuk

	d. Mobil penumpang AKDP	200,00	Sekali masuk
	e. Mobil mikro bus angkutan kota	200,00	Sekali masuk
	f. Mobil penumpang angkutan kota	150,00	Sekali masuk
	g. Taksi	500,00	Sekali masuk
2.	Pelayanan Terminal untuk kendaraan barang		
	a. Sampai dengan JBB. 2.750 kg	1.500,00	Sekali masuk
	b. JBB. 2.751 s/d 5.000 kg	2.000,00	Sekali masuk
	c. JBB. 5.001 s/d 9.000 kg	3.500,00	Sekali masuk
	d. JBB. 9.001 kg ke atas	5.000,00	Sekali masuk
3.	Pemakaian tempat usaha		
	a. Los	600,00	Per m^2/bulan
	b. Kios	3.300,00	Per m^2 /bulan
4.	Jasa ruang tunggu	250,00	Per orang
5.	Jasa toilet / WC		
	a. Buang air kecil	500,00	Sekali pakai
	b. Buang air besar	1.000,00	Sekali pakai
	c. Mandi	1.500,00	Sekali pakai

Sumber : Pemerintah Kota denpasar, 2002

Dalam rangka meningkatkan upaya penerimaan retribusi terminal sehingga lebih optimal, maka Pemerintah Kota Denpasar pada tahun 2006 merubah Perda Nomor 7 Tahun 2001 dengan Perda Kota Denpasar Nomor 12 tahun 2006 tentang Retribusi Terminal. Struktur dan besarnya tarif berdasarkan Perda Kota Denpasar Nomor 12 pasal 19 tahun 2006 dapat dilihat pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Terminal Tahun 2006

No	Jenis Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1)	Retribusi Kendaraan Umum		
	1) Mobil Bus		
	a. Mobil bus antar kota antar propinsi	2.000,00	Sekali masuk
	b. Mobil bus antar kota dalam propinsi	1.000,00	Sekali masuk
	2) Mobil penumpang		
	a. Mobil penumpang antar kota dalam provinsi	500,00	Sekali masuk
	b. Mobil penumpang dalam kota	500,00	Sekali masuk
	3) Taksi	1.000,00	Sekali masuk
2)	Retribusi pemakaian tempat usaha		
	a. Los	10.000,00	Per m^2 / bulan
	b. Kios	15.000,00	Per m^2/ bulan
3)	Retribusi ruang tunggu	250,00	Per orang
4)	Retribusi pemakaian toilet /WC		
	a. Buang air kecil	500,00	Sekali pakai
	b. Buang air besar	1.000,00	Sekali pakai
	c. Mandi	1.500,00	Sekali pakai
5)	Retribusi Terminal barang		
	1) Retribusi mobil barang		
	a. JBB. 0 s/d 2.750 kg	2.500,00	Setiap masuk

	b. JBB. 2.7501 s/d 5.000 kg	4.000,00	Setiap masuk
	c. JBB. 5.001 s/d 9.000 kg	5.000,00	Setiap masuk
	d. JBB. 9001 s/d 15.000 kg	7.500,00	Setiap masuk
	e. JBB. 15.001 s/d 20.000 kg	10.000,00	Setiap masuk
	f. JBB. 20.000 kg ke atas	15.000,00	Setiap masuk
2)	Retribusi bongkar angkutan barang		
	a. JBB. 0 s/d 2.750 kg	1.500,00	Setiap bongkar
	b. JBB. 2.7501 s/d 5.000 kg	2.000,00	Setiap bongkar
	c. JBB. 5.001 s/d 9.000 kg	3.000,00	Setiap bongkar
	d. JBB. 9001 s/d 15.000 kg	4.000,00	Setiap bongkar
	e. JBB. 15.001 s/d 20.000 kg	5.000,00	Setiap bongkar
	f. JBB. 20.000 kg ke atas	6.000,00	Setiap bongkar
3)	Retribusi angkutan barang		
	a. JBB. 0 s/d 2.750 kg	2.000,00	Sekali muat
	b. JBB. 2.7501 s/d 5.000 kg	3.000,00	Sekali muat
	c. JBB. 5.001 s/d 9.000 kg	4.000,00	Sekali muat
	d. JBB. 9001 s/d 15.000 kg	5.000,00	Sekali muat
	e. JBB. 15.001 s/d 20.000 kg	6.000,00	Sekali muat
	f. JBB. 20.000 kg ke atas	7.000,00	Sekali muat
4)	Retribusi pemakaian gedung		
	a. Bulanan	15.000,00	Per m^2 / bulan
	b. Harian	1.000,00	Per m^2 / bulan
5)	Retribusi Jasa tunggu		
	a. JBB. 0 s/d 2.750 kg	3.000,00	Per hari
	b. JBB. 2.7501 s/d 5.000 kg	4.000,00	Per hari
	c. JBB. 5.001 s/d 9.000 kg	5.000,00	Per hari
	d. JBB. 9001 s/d 15.000 kg	6.000,00	Per hari
	e. JBB. 15.001 s/d 20.000 kg	7.000,00	Per hari
	f. JBB. 20.000 kg ke atas	8.000,00	Per hari
6)	Retribusi sewa kantor	2.500,00	Per m^2/ bulan
7)	Retribusi tempat awak kendaraan	30.000,00	Per kamar/hari

Sumber : Pemerintah Kota Denpasar , 2007

Perubahan struktur dan besarnya tarif terminal diharapkan dapat meningkatkan penerimaan retribusi terminal, tetapi pada kenyataannya penerimaan terminal tetap mengalami penurunan. Untuk itu maka perlu dikaji secara mendalam. Penelitian ini bertujuan mengkaji tingkat efektivitas dan tingkat efesiensi penerimaan retribusi terminal di Kota Denpasar serta untuk mengetahui besarnya penerimaan retribusi terminal tahun 2009 -2014 di Kota Denpasar.

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut..

1) Untuk mengetahui bagaimanakah tingkat efektivitas penerimaan retribusi terminal di Kota Denpasar.
2) Untuk mengetahui bagaimanakah tingkat efisiensi penerimaan retribusi terminal di Kota Denpasar.
3) Untuk mengetahui berapakah besarnya penerimaan retribusi terminal tahun 2009-2014 di Kota Denpasar.

II. KAJIAN PUSTAKA

Sumber- Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pemberian kewenangan yang begitu luas kepada daerah kabupaten/kota sebagai implementasi daripada pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya dimaksudkan untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Dalam upaya meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah harus disertai dengan pemberian sumber-sumber pembiayaan yang memadai.

Sumber-sumber penerimaan asli daerah, menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 6 adalah.

1) Pajak Daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada semua obyek seperti orang/badan, benda bergerak/tidak bergerak. Pajak daerah di kabupaten/ kota terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak penerangan jalan dan Pajak Parkir.
2) Retribusi Daerah, yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan/ disediakan oleh pemerintah secara langsung dan nyata. Retribusi daerah meliputi: retribusi usaha umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu.
3) Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, antara lain hasil kerjasama dengan pihak ketiga. dan hasil perusahaan milik daerah atau bagian laba dari BUMN.
4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, yang dimaksud dengan nilai-nilai PAD yang sah antara lain penerimaan daerah di luar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan asset daerah.

Dari keempat komponen pendapatan asli daerah tersebut di atas, komponen pajak daerah dan komponen retribusi daerah sampai saat ini masih merupakan primadona bagi seluruh daerah kabupaten/kota, karena kontribusi kedua komponen tersebut terhadap pendapatan asli daerah masih sangat dominan. Diera otonomi daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota diharapkan mampu mengoptimalkan semua komponen pendapatan asli daerahnya, sehingga masing-masing

komponen pendapatan asli daerah dapat memberikan kontribusi yang memadai terhadap peningkatan pendapatan daerah pada masa yang akan datang.

Retribusi Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Begitu pula pendapat Munawir (1998:8) mengemukaan, bahwa retribusi daerah merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan ini bersifat ekonomis, karena siapapun yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran tersebut.

Kaho (1997:154) Mengatakan, bahwa retribusi yang diserahkan kepada daerah yang cukup memadai, baik dalam jenis maupun jumlahnya, namun hasil riil yang dapat disumbangkan sektor ini bagi keuangan daerah masih sangat terbatas karena tidak semua jenis retribusi yang kini dipungut daerah memiliki prospek positif. Ciri-ciri Pokok Retribusi daerah yaitu : Retribusi dipungut oleh daerah, 2) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk, 3) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, retribusi daerah dikelompokan menjadi 3 golongan yaitu.

1) Retribusi Jasa Umum, yaitu Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Contoh retribusi jasa umum adalah retribusi persampahan dan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
2) Retribusi Jasa Usaha, yaitu Retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Contoh retribusi ini adalah retribusi terminal dan retribusi rumah potong hewan.
3) Retribusi Perijinan Tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan atau ketertiban umum, misalnya ijin trayek dan ijin mendirikan bangunan.

Jenis-jenis retribusi daerah yang ada di Kota Denpasar berjumlah 15 yang terdiri dari: 1)Retribusi Pelayanan Kesehatan, 2) Retribusi Pelayanan Persampahan, 3) Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Capil, 4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, 5) Retribusi

Pengujian Kendaraan Bermotor, 6) Retribusi Terminal, 7) Retribusi Ijin Trayek, 8) Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan, 9) Retribusi Pemindahan Kendaraan Bermotor, 10) Retribusi IMB (Ijin Mendirikan Bangunan), 11) Retribusi Ijin Gangguan, 12) Retribusi Ijin Usaha Perikanan, 13) Retribusi SIUP, SIUP MB, IUI, TDP, 14) Retribusi Setoran Lahan BPP, 15) Retribusi Ijin Prinsip dan Usaha

Retribusi Terminal

Berdasarkan pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah disebutkan bahwa salah satu jenis retribusi jasa usaha adalah retribusi terminal, yang pelayanannya disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi pelayanan dengan mengunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai yang disediakan oleh pihak swasta.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar nomor 12 tahun 2006 tentang Retribusi Terminal, Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi. Terminal di Kota Denpasar terdiri dari terminal penumpang dan terminal barang, Dimana masing-masing terminal memiliki fasilitas utama dan fasilitas penunjangnya.

Pada pasal 5 didalam Bab IV Peraturan Daerah tahun 2006 mengenai Fasilitas Terminal, dapat dijelaskan fasilitas yang tersedia di lingkungan terminal, yaitu.

1) Fasilitas utama terminal penumpang terdiri dari : a) Jalur pemberangkatan kendaraan umum, b) Jalur kedatangan kendaraan umum, c) Tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum, d) Bangunan kantor terminal, e)Tempat tunggu penumpang dan/ atau pengantar, f) Menara pengawas g) Loket penjualan karcis, h) Rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, i) Pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi
2) Fasilitas penunjang terminal penumpang terdiri dari: a) Kamar kecil/toilet, b) Tempat beribadah, c) Kios/kantor, d) Ruang informasi/ pengaduan, e) Telepon umum, f) Tempat penitipan barang, g)Taman
3) Fasilitas utama terminal barang terdiri dari : a) Bangunan kantor terminal. b) Tempat parkir kendaraan untuk melakukan bongkar dan/ atau muat barang. c) Gudang atau lapangan penumpukkan barang. d) Tempat parkir kendaraan angkutan barang, untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan. e) Peralatan bongkar-muat barang.

4) Fasilitas penunjang terminal barang terdiri dari: a) Tempat istirahat awak kendaraan. b) Fasilitas parkir kendaraan,selain kendaraan angkutan barang.c) Alat timbang kendaraan dan muatannya. d) Kamar kecil/ toilet. e) Tempat ibadah. f) kios/ kantin. g) telepon umum dan Taman.

Subyek retribusi terminal adalah setiap orang yang pribadi dan badan yang menggunakan fasilitas terminal, yang selanjutnya dapat disebut sebagai wajib retribusi. Wajib retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu. Sedangkan masa retribusi terminal tergantung pada jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa penyediaan fasilitas terminal ditetapkan berdasarkan: 1) Frekuensi keluar-masuk kendaraan, 2) Jenis kendaraan, 3) Jenis kegiatan usaha, 4) Lama waktu pemakaian fasilitas terminal

Penyelenggaraan terminal dilakukan dan dilaksanakan dengan tujuan untuk.

1) Mewujudkan lalu lintas angkutan orang dan barang dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman, efisien dan mampu memadukan moda transportasi lainnya.
2) Menunjang kelancaran mobilitas angkutan orang/ penumpang dan barang
3) Memberikan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban dalam rangka pelayanan kepada pengguna jasa terminal
4) Peningkatan pendapatan asli daerah

Pelayanan terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal. Pelayanan jasa usaha pada terminal yang dikenakan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2006 antara lain : 1) Retribusi terminal kendaraan umum yang meliputi mobil bus antar kota antar provinsi (AKAP), mobil bus antar kota dalam provinsi (AKDP). 2) Retribusi mobil penumpang AKDP, mobil penumpang dalam kota dan taksi. 3) Retribusi pemakaian tempat usaha seperti los dan kios. 4) Retribusi ruang tunggu, dan 5) Retribusi pemakaian Toilet. Sedangkan pelayanan jasa usaha pada retribusi terminal barang antara lain: 1) Retribusi mobil barang, 2)Retribusi bongkar angkutan barang, 3) Retribusi muatan angkutan barang, 4) Retribusi pemakaian gudang, 5) Retribusi jasa tunggu, 6) Retribusi sewa kantor, 7) Retribusi tempat istirahat awak kendaraan, 8) Retribusi pemakaian toilet.

Efektivitas

Efektivitas didefinisikan sebagai suatu kemampuan untuk mewujudkan suatu rencana atau target. Artinya, seberapa mampu suatu unit atau lembaga untuk mewujudkan target yang telah direncanakan.

Menurut Mardiasmo dan Makhfatih (2000:II,5) untuk perhitungan efektivitas, apabila hasil menunjukan persentase yang semakin besar dapat dikatakan bahwa pengelolaan retribusi semakin efektif, demikian pula sebaliknya semakin kecil persentase hasilnya menunjukkan pengelolaan retribusi semakin tidak efektif

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi terminal}}{\text{Target penerimaan retribusi terminal}} \text{ X } 100\%$$

Berikut disampaikan pedoman kriteria penilaian efektivitas penerimaan retribusi terminal diukur dengan menggunakan kriteria skala interval sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Efektivitas Penerimaan Retribusi Terminal

Efektivitas Penerimaan Retribusi Terminal (%)	Tingkat Efektivitas Penerimaan Retribusi Terminal
Diatas 100	Sangat efektif
90 -100	Efektif
80 - 89	Cukup Efektif
60 – 79	Kurang Efektif
Dibawah 60	Tidak Efektif

Sumber: Fisipol UGM, 1991

Efisiensi

Osborner (1997: 389) mengatakan, bahwa efisiensi adalah ukuran berapa banyak biaya untuk masing-masing unit output. Ketika kita mengukur efisiensi, kita tahu berapa banyak biaya yang kita tanggung untuk mencapai hasil tertentu. Beberapa cara untuk meningkatkan efi siensi adalah dengan meningkatkan output dengan input yang sama, atau dengan output berproporsi yang besar dengan kenaikan input yang proposional atau juga dengan menurunkan input dengan proporsi yang besar dan menurunkan output secara proposional.

Menurut Mardiasmo dan Makhfatih (2000:II,5), untuk menghitung efisiensi tersebut digunakan rumusan sebagai berikut.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya operasional terminal}}{\text{Realisasi penerimaan retribusi terminal}} \text{ X } 100\%$$

Berikut Disampaikan pedoman kriteria efisiensi biaya pengelolaan retribusi terminal diukur dengan menggunakan kriteria skala interval sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 2 Kriteria Efisiensi Biaya Pengelolaan Retribusi Terminal

Efisiensi Pengelolaan Retribusi Terminal (%)	Tingkat Efisiensi Pengelolaan Penerimaan Retribusi Terminal

Diatas 100	Tidak efisien
90 -100	Kurang Efisien
80 - 89	Cukup Efisien
60 – 79	Efisien
Dibawah 60	Sangat efisien

Sumber: Fisipol UGM, 1991

III. METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Denpasar dengan alasan karena Retribusi terminal di Kota Denpasar terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun mulai periode tahun 2004 sampai 2007, hal tersebut seharusnya tidak terjadi mengingat Kota Denpasar merupakan pusat kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata, dengan fungsi terminal sebagai prasarana transportasi jalan yang mempunyai posisi penting dan strategis dalam memperlancar perekonomian sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dari/dan/ke Kota Depasar. Diperkirakan terjadi kebocoran dalam menghitung penerimaan retribusi terminal dari tahun 2004-2008, dimana terdapat beberapa penerimaan yang tidak tercatat sebagai penerimaan terminal, dan penetapan target tidak disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini, obyek yang diteliti yaitu Penerimaan Retribusi Terminal periode tahun 2004 sampai dengan 2008.

Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian menggunakan metode observasi non prilaku, yaitu salah satu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap data yang diperlukan pada instansi terkait khususnya Dinas Pendapatan Kota Denpasar dan Dinas Perhubungan Kota Denpasar.

Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional dari Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1) Realisasi penerimaan retribusi terminal dimaksud adalah jumlah keseluruhan penerimaan dari retribusi terminal pada suatu periode tahun tertentu, yang dinyatakan dalam satuan rupiah, dari tahun 2004 sampai 2008.
2) Target penerimaan retribusi terminal dimaksud adalah rencana penerimaan retribusi terminal pada suatu periode tahun tertentu, yang dinyatakan dalam satuan rupiah dari tahun 2004 sampai 2008.

3) Biaya Pengelolaan terminal dimaksud adalah total biaya operasional yang dikeluarkan dalam rangka pengelolaan terminal pertahun, yang dinyatakan dalam satuan rupiah periode dari tahun 2004 sampai 2008.

Teknik Analisis Data

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka dalam menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah
analisis efektivitas, efisiensi dan prospek, yaitu sebagai berikut.

1) Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Terminal

Besaran ini mengukur hubungan antara realisasi penerimaan retribusi terminal dengan target retribusi. Menurut Mardiasmo dan Makhfatih (2000: II,5) untuk menghitung efektivitas tersebut digunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi terminal}}{\text{Target penerimaan retribusi terminal}} \text{ X } 100\% \text{.....(3.1)}$$

2) Analisis Efisiensi

Analisis ini digunakan untuk mengukur bagian dari realisasi penerimaan retribusi terminal yang digunakan dalam menutup biaya pungutan. Bila biaya pungutan ditekan serendah mungkin, maka nilai efisiensi akan menjadi lebih besar. Menurut Mardiasmo dan Makhfatih (2000: II,5), rumus yang digunakan adalah.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya operasional terminal}}{\text{Realisasi penerimaan retribusi terminal}} \text{ X } 100\% \text{.....(3.2)}$$

3) Prospek Retribusi Terminal

Untuk menghitung besarnya Proyeksi Penerimaan Retribusi Terminal, Menurut Wirawan, (2001;183) digunakan Analisis *Trend Linear* dengan Rumus sebagai berikut.

$$Ý = a + b\,X \text{ .....(3.3)}$$

Keterangan:

Ý = Proyeksi Penerimaan Retribusi Terminal / Nilai Taksiran atau Nilai Trend (Rp.)

X = Periode waktu (Tahun)

a = Intersep, yaitu besarnya nilai Y bila X = 0 (Tahun dasar peramalan)

b = Koefisien, *slope* garis *trend* yaitu perubahan variabel Y untuk setiap perubahan perubahan satu unit variabel X

Dari persamaan tersebut, nilai a dan b dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut.

$$a = \frac{\Sigma Yi}{n} \quad , \quad b = \frac{\Sigma Xi.Yi}{\Sigma Xi^2}$$

Keterangan : n = banyaknya pasangan data

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Tingkat Efektivitas Penerimaan Retribusi Terminal

Perhitungan efektivitas merupakan salah satu indikator kinerja bagi pelaksanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan untuk menyajikan informasi tentang seberapa besar pencapaian sasaran atas target. Untuk melakukan perhitungan efektivitas retribusi terminal berdasarkan target, dibutuhkan data realisasi dan target penerimaan retribusi terminal.Jika angka yang dihasilkan menunjukan angka yang semakin besar (diatas 100 persen), maka hasil perhitungan menunjukan tingkat efektivitas yang semakin sangat efektif. Mengenai rincian realisasi penerimaan retribusi terminal dan target penerimaan dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Perhitungan Tingkat Efektivitas Retribusi Terminal Kota Denpasar Tahun 2004-2008

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Efektivitas (%)	Tingkat Efektivitas
2004	366.000.000,00	379.157.000,00	103,59	Sangat Efektif
2005	381.000.000,00	347.294.800,00	91,15	Efektif
2006	293.000.000,00	334.126.096,00	114,04	Sangat Efektif
2007	284.000.000,00	319.923.650,00	112,65	Sangat Efektif
2008	1.994.000.000,00	1.670.636.330,00	83,78	Cukup Efektif
		Rata-rata	101,04	Sangat Efektif

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Denpasar, Tahun 2004-2008 (Diolah)

Dengan mengunakan rumus.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi terminal}}{\text{Target penerimaan retribusi terminal}} \text{ X } 100\%$$

Diperoleh hasil,

$$\text{Efektivitas Tahun 2004} = \frac{379.157.000}{366.000.000} \text{ X } 100\%$$

$$= 103,59\%$$

Pada Tabel 4.1, memperlihatkan, bahwa tingkat efektivitas penerimaan retribusi di Terminal Kota Denpasar dari Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2008 rata-rata 101,04 persen, Hal ini menunjukan bahwa secara rata-rata penerimaan retribusi terminal termasuk dalam kriteria sangat efektif dan penentuan target penerimaan tidak berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode sistematis. Tingkat efektivitas tertinggi sebesar 114,04 persen pada tahun 2006. Hal ini dapat diartikan, bahwa target penerimaan yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan masih berada di bawah potensi yang sebenarnya. Oleh karena itu, Dinas pendapatan maupun Dinas Perhubungan dalam menetapkan target penerimaan perlu melakukan perhitungan secara akurat terhadap besarnya potensi penerimaan retribusi terminal sehingga penerimaan berdasarkan target yang ditetapkan dapat lebih ditingkatkan.

Pada tahun 2005, tingkat efektivitas penerimaan retribusi terminal mencapai 91,15 persen. Tingkat efektivitasnya termasuk kriteria efektif, yaitu antara 90 persen sampai 100 persen. Perlu juga dicermati, bahwa penetapan target semestinya diadakan evaluasi, apakah hasil yang diperoleh tersebut memang benar sesuai dengan perhitungan, kareana pencapaian atau penetapan target penerimaan retribusi terminal berfluktuasi, sehingga hasil yang dicapai diharapkan meningkat.

Pada tahun 2008, tingkat efektivitas penerimaan retribusi terminal mencapai 83,78 persen. Tingkat efektivitasnya termasuk kriteria cukup efektif, yaitu antara 80 persen sampai 90 persen. Tidak tercapainya kriteria efektif, karena pada tahun 2008 penetapan targetnya terlalu tinggi untuk direalisasikan, mengingat belum adanya perhitungan dari tahun sebelumnya mengenai penerimaan retribusi terminal barang atau cargo yang baru dioperasikan pada tahun tersebut.

Pencapaian Penerimaan retribusi terminal yang sangat efektif tidak menandakan perkembangan potensi terminal sudah optimal, dengan seringnya terjadi penurunan target penerimaan retribusi menyebabkan retribusi terminal tidak dapat dioptimalkan penerimaannya. Padahal masih banyak terdapat potensi yang bisa dikembangkan untuk menambah penerimaan tanpa harus menurunkan target. Pesimis yang dialami Dinas Perhubungan dan UPT. Terminal atas

kondisi ekonomi daerah, menunjukkan kurang seriusnya menangani masalah yang ada di lingkungan terminal, kondisi areal kendaraan angkutan umum yang terbatas, jumlah kendaraan umum layak operasi, kenyamanan penumpang yang menunggu di terminal, jumlah gudang terminal barang yang terbatas. Hal ini menyebabkan pengusaha mengunakan gudang pribadi di tengah kota yang dapat mengurangi penerimaan yang seharusnya bisa menambah penerimaan retribusi terminal. Kurang tegasnya petugas untuk memunggut retribusi terminal, karena tidak semua pengguna fasilitas atau obyek retribusi terminal dikenakan iuran, serta masih banyaknya terjadi *mark up* atau penyelewengan retribusi dengan menaikan tarif yang dikenakan dengan alasan tidak mempunyai uang kembalian.

Perhitungan Tingkat Efisiensi Penerimaan Retribusi Terminal

Perhitungan efisiensi dalam penelitian ini dengan membandingkan antara biaya operasional terminal dengan realisasi penerimaan retribusi terminal. Penerimaan retribusi terminal dan biaya operasional terminal yang dikeluarkan UPT. Terminal Kota Denpasar di bawah pengawasan Dinas Perhubungan Kota Denpasar, disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Perhitungan Tingkat Efisiensi Retribusi Terminal Kota Denpasar Tahun 2004-2008

Tahun	Biaya operasional (Rp)	Realisasi penerimaan (Rp)	Efisiensi (%)	Tingkat Efisiensi
2004	257.224.405	379.157.000	67,84	Efisien
2005	463.508.984	347.294.800	133,46	Tidak Efisien
2006	488.388.731	334.126.096	146,17	Tidak Efisien
2007	449.819.000	319.923.650	140,60	Tidak Efisien
2008	1.074.834.853	1.670.636.330	64,34	Efisien
		Rata-rata	110,48	Tidak Efisien

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Denpasar, Tahun 2004-2008 (diolah)

Dengan mengunakan rumus.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya operasional terminal}}{\text{Realisasi penerimaan retribusi terminal}} \text{ X } 100\%$$

Diperoleh hasil,

$$\text{Efisiensi Tahun 2004} = \frac{257.224.405}{379.157.000} \text{ X } 100\%$$

$$= 67,84\ \%$$

Dari Tabel 4.2 dapat dilihat, bahwa besarnya biaya operasional setiap tahunnya tidak sama dan cenderung semakin meningkat. Peningkatan biaya operasional tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp 1.074.834.853,00, dimana peningkatan biaya disebabkan terjadi kenaikan gaji pegawai negeri, pegawai harian lepas, pemakaian listrik secara berlebihan serta biaya telpon dan air. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukan, bahwa tingkat efisiensi penerimaan retribusi terminal selama periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 berkisar antara 64,34 persen sampai dengan 146,17 persen, atau dengan tingkat efisiensi rata-rata sebesar 110,48 persen dan menunjukkan kecenderungan semakin tidak efisiennya penerimaan dalam mengelola retribusi terminal.

Berdasarkan hasil dua penelitian sebelumnya, dimana mengunakan obyek analisis yang berbeda, yaitu persampahan dan pasar dapat dilihat, bahwa hampir semua penerimaan retribusi di Kota Denpasar memiliki rata-rata tingkat efisiensi yang relatif rendah, yaitu tidak efisien, sehingga masih dibiayai oleh dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk menjalankan pengelolaan retribusi daerahnya. Tidak efisiennya pengelolaan retribusi terminal menandakan belum mandirinya instansi terkait mengatur keuangan pembiayaan. Usaha memperoleh sumber penerimaan untuk pembiayaan operasional masih rendah, karena dari tahun ke tahun peningkatan biaya yang tinggi malah disertai penurunan penerimaan retribusi terminal.

Terdapat pembiayaan yang seharusnya dapat dikurangi sebagai pembiayaan pengelolaan terminal, yaitu biaya listrik akibat pemakaian berlebihan dan penggunaan telepon yang tidak seharusnya atau tidak berhubungan dengan urusan dinas. Biaya operasional yang tinggi sebenarnya dapat diatasi apabila dinas perhubungan atau UPT. Terminal yang bersangkutan dapat lebih memikirkan bagaimana menambah penerimaan retribusinya dengan memanfaatkan potensi yang ada dan lebih memperhatikan kondisi lingkungan di sekitar terminal, serta memikirkan peluang-peluang yang bermanfaat untuk menambah penerimaan retribusinya di banding mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat. Apabila hal tersebut bisa dilaksanakan maka instansi tersebut dianggap sudah mampu untuk menciptakan kemandirian daerah.

Perhitungan Prospek/ Perkiraan Penerimaan Retribusi Terminal

Penerimaan retribusi terminal di Kota Denpasar mengalami fluktuasi, yaitu pada tahun 2004 penerimaannya sebesar 103,59 persen, tahun 2005 sebesar 91,15 persen,tahun 2006 sebesar 114,04 persen, tahun 2007 sebesar 112,65 persen dan tahun 2008 sebesar 85,78 persen. Hal ini menunjukan tidak jelasnya dalam penentuan target, sehingga realisasi penerimaan tidak mengikuti analisis trend.

Untuk mengetahui perkiraan penerimaan retribusi terminal digunakan analisis *trend linier*. Berdasarkan rumus yang telah dijelaskan pada teknik analisis data, maka perhitungan analisis trend penerimaan retribusi terminal di Kota Denpasar adalah seperti pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Perhitungan Analisis Trend Penerimaan Retribusi Terminal di Kota Denpasar Tahun 2009- 2014

Tahun	Realisasi Retribusi Terminal	Xi	Xi^2	Xiyi
2004	379.157.000	-2	4	-758.314.000
2005	347.294.800	-1	1	-347.294.800
2006	334.126.096	0	0	0
2007	319.923.650	1	1	319.923.650
2008	1.670.636.330	2	4	3.341.272.660
Total	3.051.137.876	0	10	2.555.587.510

Sumber: Tabel 1.3 (data diolah)

Ỳi = a + b Xi ,

dimana: a = 3.051.137.876 / 5 = 610.227.575,2

b = 2.555.587.510 / 10 = 255.558.751

Ỳi = 610.227.575,2 + 255.558.751 Xi

Berdasarkan persamaan *trend* di atas, maka perkiraan penerimaan retribusi terminal di Kota Denpasar dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 seperti tabel 4.4.

Tabel 4.4 Perkiraan penerimaan retribusi terminal di Kota Denpasar Tahun 2009-2014

Tahun	Perkiraan Penerimaan (Rp)	Pertumbuhan (%)
2009	1.376.903.828	-
2010	1.632.462.579	18,56
2011	1.888.021.330	15,65
2012	2.143.580.081	13,54
2013	2.399.138.823	11,92
2014	2.654.697.583	10,65

Sumber: (data diolah)

Ỳi = a + b Xi dimana: a = 3.051.137.876 / 5 = 610.227.575,2

b = 2.555.587.510 / 10 = 255.558.751

Ỳi = 610.227.575,2 + 255.558.751 xi

$\grave{Y}_{2009}$ = 610.227.575,2 + 255.558.751 (3)
= 610.227.575,2 + 766.676.253
= 1.376.903.828

$\grave{Y}_{2010}$ = 610.227.575,2 + 255.558.751 (4)
= 610.227.575,2 + 1.022.235.004
= 1.632. 462.579

$\grave{Y}_{2011}$ = 610.227.575,2 + 255.558.751 (5)
= 610.227.575,2 + 1.277.793.755
= 1.888.021.330

$\grave{Y}_{2012}$ = 610.227.575,2 + 255.558.751 (6)
= 610.227.575,2 + 1.533.352.506
= 2.143.580.081

$\grave{Y}_{2013}$ = 610.227.575,2 + 255.558.751 (7)
= 610.227.575,2 + 1.788.911.257
= 2.399.138.832

$\grave{Y}_{2014}$ = 610.227.575,2 + 255.558.751 (8)
= 610.227.575,2 + 2.044.470.008
= 2.654.697.583

Tabel 4.4 menunjukan, bahwa prospek/perkiraan penerimaan retribusi terminal terbesar diterima pada tahun 2014 sebesar Rp 2.654.697.583,00, dengan tingkat pertumbuhan 10,65 persen dan prospek/perkiraan penerimaan retribusi terminal terkecil diterima pada tahun 2009 sebesar Rp 1.376.903.828,00.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis tingkat efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi terminal serta prospek penerimaan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 di Kota Denpasar adalah sebagai berikut.

5) Tingkat efektivitas penerimaan retribusi terminal di Kota Denpasar dari tahun 2004-2008, sangat efektif.
6) Tingkat efisiensi penerimaan retribusi terminal di Kota Denpasar dari tahun 2004 - 2008,tidak efisien.
7) Prospek/ perkiraan penerimaan retribusi terminal untuk enam tahun kedepan adalah sebesar Rp 1.376.903.828,00 untuk tahun 2009, pada tahun 2010 sebesar Rp 1.632.462.579,00, tahun

2011 sebesar Rp 1.888.021.330,00, tahun 2012 sebesar Rp 2.143.580.081,00, tahun 2013 sebesar Rp 2.399.138.832,00, dan tahun 2014 penerimaan sebesar Rp 2.654.697.583,00.

Saran

Berdasarkan Pembahasan Hasil Penelitian dan simpulan di atas dapat disampaikan saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Denpasar dalam menetapkan target penerimaan retribusi sebagai berikut.

1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan retribusi terminal, maka target yang ditetapkan hendaknya memperhatikan potensi yang sebenarnya terdapat dilingkungan terminal seperti kondisi tersedianya tempat areal parkir, kondisi jumlah angkutan kendaraan umum layak operasi, kondisi fasilitas sarana prasarana di sekitar terminal, sehingga target yang ditetapkan dapat terus tercapai dan mengalami peningkatan.
2) Perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat dalam melaksanakan pemungutan retribusi terminal, melakukan peningkatan dalam menjaga keamanan dan kenyamanan serta kebersihan fasilitas yang ada di terminal.
3) Pelaksanaan Retribusi Terminal harus lebih tertib dan transparan serta perlu dilakukan revisi terhadap perda retribusi terminal mengenai tarif dan strukturnya.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kota Denpasar. 2009. *Denpasar Dalam Angka 2009*. Kota Denpasar

Depdagri Republik Indonesia, 1999. *Pemerintah Daerah*, UU No. 22 ,Jakarta

Depdagri Republik Indonesia,2004. *Republik Indonesia No. 33 tahun 2004* tentang " Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah". Dirjen PUOD jakarta.

Devas, N.B. Blinder, K. Devey, R. Kelly. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Universitas Indonesia.* Jakarta.

Dinas Pendapatan Kota Denpasar, 2009. *Laporan Tahunan 2004-2008.* Kota Denpasar.

Dinas Perhubungan Kota Denpasar, 2008. *Laporan realisasi fisik dan keuangan APBD Kota Denpasar Tahun 2002-2007 pada Dinas Perhubungan*. Kota Denpasar.

Dinas Perhubungan Kota Denpasar, 2009. *Laporan realisasi fisik dan keuangan APBD Kota Denpasar Tahun 2008 pada Dinas Perhubungan*. Kota Denpasar.

Denpasar Tahun 2008 pada Dinas Perhubungan. Kota Denpasar, 2008. *LAKIP SKPD Dinas perhubungan 2007*. Kota Denpasar.

Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Denpasar.2008. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Mekanisme Pengujian*. Kota Denpasar

Fisipol UGM. 1991. *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggungjawab.* Jakarta: Badan Bank Depdagri.

Juliawati, Ni Putu.2007."Potensi dan Efisiensi Serta Prospek Retribusi Pasar di Kota Denpasar" S2 *Tesis*. Tidak Dipublikasikan. Denpasar.

Kaho, Yosep Riwu. 1997. *Praktek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Cetakan Keempat: PT. Grafindo Persada. Jakarta.

Mardiasmo dan Makhfatih, Ahmad.2000. *Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang*. Laporan Akhir Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Dengan Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi UGM. Tidak dipublikasi. Yogyakarta.

Munawir,S. 1998. *Perpajakan*. Edisi Kelima, Cetakan Kedua: Liberty. Jakarta.

Osborne David, Ted gaebler. 1997. *Mewirausahakan Birokrasi (Penerjemah: Abdul Rosyid)*. Cetakan Keenam: PT. Pustaka Binaman Presindo. Jakarta.

Pemerintah Kota Denpasar,2001."Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah".

Pemerintah Kota Denpasar,2002."Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Fasilitas Terminal".

Pemerintah Kota Denpasar, 2007." Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Terminal".

Putri, Eka Vidya Jayani. 2008. "Analisis Potensi Penerimaan Retribusi pelayanan Persampahan/ Kebersihan di Kota Denpasar" *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Syamsi, Ibnu. 1987. *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara*. PT.Bina Aksara.

Trisnadewi.2002." Analisis Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam peningkatan PAD Kabupaten Badung Periode 2000-2004" S2 *Tesis*. Tidak Dipublikasikan. Denpasar.

Waluyo. 2006. Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru. Edisi Keenam: Salemba Barat. Jakarta.

Widodo, H G Suseno T.1990, Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia, Kanisius, Yogyakarta.

Wirawan, Nata. 2001. Statistik 1 (Statistik Deskriptif) Edisi Kedua, Kararas Emas.Denpasar.